

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PROMOTOR DAN KO PROMOTOR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>MENGUCAPKAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>xxvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR SKEMA .....</b>	<b>xxxii</b>
 <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	29
1.3 Tujuan Penelitian .....	30
1.3.1 Tujuan Umum .....	30
1.3.2 Tujuan Khusus .....	30
1.4 Manfaat Penelitian.....	30
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	30
1.4.2 Manfaat Praktis .....	31

1.5	Orisinalitas Penelitian.....	32
1.6	Kerangka Konseptual .....	33
1.7.	Metode Penelitian.....	43
1.7.1	Tipe Penelitian .....	43
1.7.2.	Pendekatan Masalah.....	44
1.7.3	Sumber Bahan Hukum.....	45
1.7.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
1.7.5	Analisis Bahan Hukum .....	48
1.8	Sistematika Penulisan .....	48

## **BAB II PERSEKTIF FILOSOFI HAK GUGAT MASYARAKAT HUKUM DALAM PERTAMBANGAN BATUBARA**

2.1	Kewajiban Negara dan Hak Warga Negara Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat.....	53
2.1.1	Filosofi Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat .....	53
2.1.2	Kewajiban Negara dan Warga Negara Atas Lingkungan yang Baik .....	83
2.2	Hakekat Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara .....	91
2.2.1	Hak Gugat pada Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara .....	112
2.2.2	Kepentingan Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara .....	118
2.2.3	Hubungan Hukum Hak Gugat pada Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara .....	124
2.2.4	Ganti Rugi Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara .....	131

### **BAB III KAREKTERISTIK MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DAPAT MELAKUKAN HAK GUGAT MASYARAKAT HUKUM ADAT**

3.1	Karakteristik Masyarakat Hukum Adat Dalam Pertambangan Batubara .....	137
3.1.1	Sekelompok Orang.....	137
3.1.2	Tunduk Pada Suatu Tata Tertib .....	143
3.1.3	Mampunyai Harta Sendiri Baik yang Berupa Materil Maupun Immaterial .....	148
3.1.4	Mampunyai Wilayah.....	161
3.1.5	Tidak Ada Niat Untuk Membubarkan Diri .....	164
3.1.6	Hubungan Antara Lingkungan dan Masyarakat Hukum Adat Tidak Terpisahkan (Holistik).....	166
3.2	Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dan Pengakuannya .....	168
3.2.1	Hak-hak Masyarakat Hukum Adat .....	168
3.2.2	Pengakuan Internasional Masyarakat Hukum Adat .....	185
3.2.3	Pengakuan Nasional Masyarakat Hukum Adat .....	191
3.2.4	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi .....	194
3.2.5	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah .....	199
3.3	Pengaturan Masyarakat Hukum Adat di Philipina .....	209
3.3.1	Sistem Hukum Terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat .....	210
3.3.2	Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat .....	213
3.3.3	Komisi Nasional Masyarakat Hukum Adat .....	221
3.3.4	Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat .....	224

- 3.3.5 Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara di Negara Indonesia dan Philipina ..... 226

#### **BAB IV IMPLEMENTASI HAK GUGAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERTAMBANGAN BATUBARA**

- 4.1 Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengakui Legal Standing Masyarakat Hukum Adat..... 230
- 4.1.1 Putusan Nomor 010/PUU-1/2003 Perihal Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam..... 231
- 4.1.2 Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku ..... 234
- 4.1.3 Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan ..... 238
- 4.1.4 Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan..... 240
- 4.1.5 Putusan Nomor Nomor 25/PUU-VIII/2010 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ..... 244
- 4.1.6 Putusan Nomor 10/PUU-XII/2014 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ..... 247
- 4.2 Ius Constituendum pada Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara ..... 248
- 4.2.1 Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat..... 248

4.2.2. Prinsip Free and Prior Inform Concern ..... 262

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan ..... 274

5.2 Saran..... 275

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3380) Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang United Nation Framework Convention on Climate Change (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 86 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)

Undang-Undang Republik Indonesia 24 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4121)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Negara Agraria Republik Indonesia /Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Kelompok (Class Action)

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. S.75/Menhut-II/2004 tentang Perihal Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompesasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum adat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Dalam Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Jenis Kerugian Dalam Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Agraria Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman dan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat

Surat Edaran Menteri Kehutanan No. S.75/Menhut-II/2004 tentang Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompesasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat



## DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-1/2003 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku.

Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 Tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 47- 81/PHPU.A-VII/2009 tentang Perihal Pengujian Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Yahukimo.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

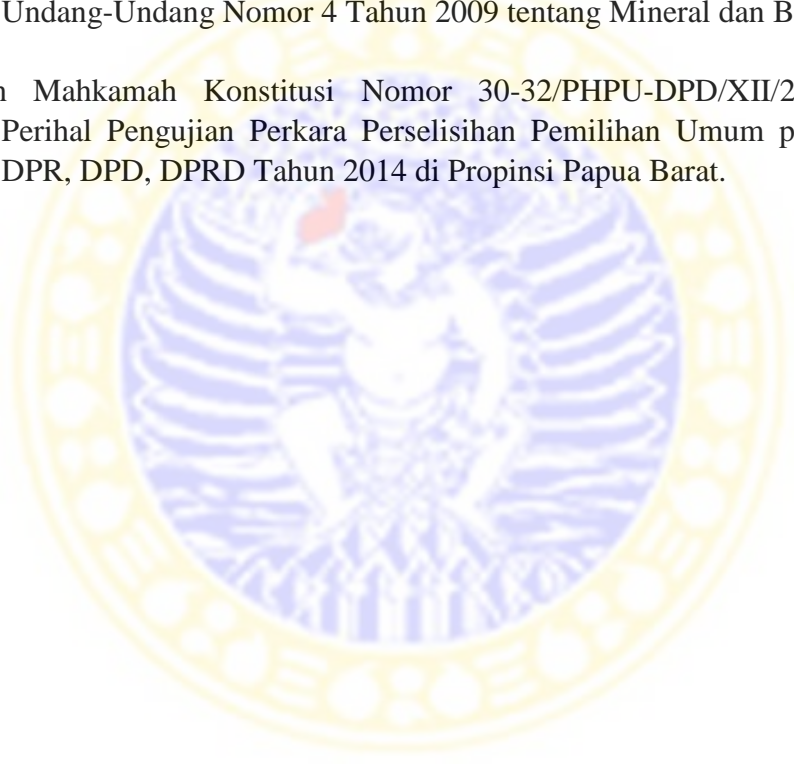
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU- VIII/2010 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- IX/2011 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-32/PHPU-DPD/XII/2014 tentang Perihal Pengujian Perkara Perselisihan Pemilihan Umum pada Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di Propinsi Papua Barat.



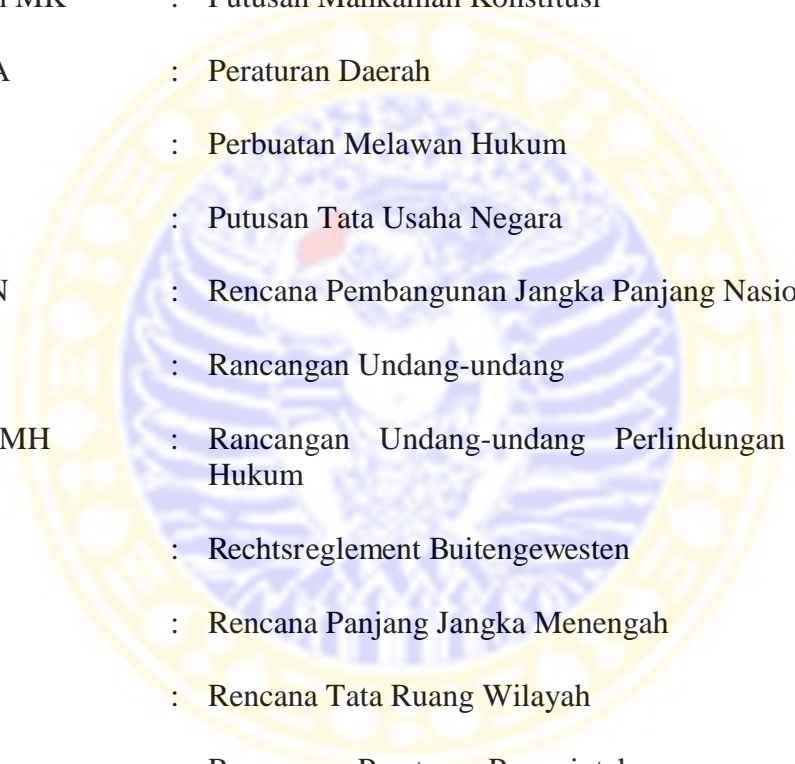
## DAFTAR SINGKATAN

AUPB	:	Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
ALRC	:	Australia Law Reform Commission
A.B	:	Algemene Bapalingen van wet geving voor Nederlandsch Indie
AMAN	:	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
ABD	:	Asian Development Bank
AMDAL	:	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
BPHN	:	Badan Pembinaa Hukum Nasional
BPKMHA	:	Badan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
B3	:	Bahan Berbahaya dan Beracun
BPUPKI	:	Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BW	:	Burgelijk Wetboek
BLH	:	Badan Lingkungan Hidup
CLS	:	Citizen Lawsuit
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
ESDM	:	Menteri Energi Sumber Daya Manusia
FPIC	:	Free and Prior Inform Concern
GSM	:	Gerakan Samarinda Menggugat
GBHRK	:	Gerakan Bantuan Hukum Rakyat Kalimantan
HAM	:	Hak Asasi Manusia



HIR	: Herziene Inlands Regelement
HPH	: Pemegang Hak Penguasaan Hutan
ISPA	: Infeksi Saluran Pernafasan Akut
ILO	: International Labour Organization
IPRA	: Indigenous People Rights Act
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPHHK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
ITTO	: International Tropical Timber Agreement
ICCPR	: Internasional Convention on Civill and Political Right
JATAM KALTIM	: Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur
KAT	: Komunitas Adat Terpencil
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KEM	: Kelian Equatotial Mining
KTUN	: Keputusan Tata Usaha Negara
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LKMD	: Lembaga Kesatuan Masyarakat Desa
MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NFAP	: National Forest Action Plan
OLH	: Organisasi Lingkungan Hidup
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang





PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PT	: Perseroan Terbatas
PUU	: Pengujian Undang-Undang
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PMA/KBPN	: Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Putusan MK	: Putusan Mahkamah Konstitusi
PERDA	: Peraturan Daerah
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
PTUN	: Putusan Tata Usaha Negara
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RUU	: Rancangan Undang-undang
RUU PMH	: Rancangan Undang-undang Perlindungan Masyarakat Hukum
RBg	: Rechtsreglement Buitengewesten
RPJM	: Rencana Panjang Jangka Menengah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
SARA	: Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan
SE	: Surat Edaran
TFAP	: Tropical Forest Action Plan
WCIP	: World Council of Indigenous Peoples
WALHI	: Yayasan Wahana Lingkungan Hidup
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights

UKL	:	Upaya Pengelolaan Lingkungan
UPL	:	Upaya Pemantauan Lingkungan
UNCED	:	The United Nations Conference on Environment and Development
UNDP	:	United Nation Development Programme
UU	:	Undang-undang
UU MK	:	Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
UUPA	:	Undang-Undang Pokok Agraria
UUPPLH	:	Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU Minerba	:	Undang-undang Mineral dan Batubara
UUD	:	Undang-Undang Dasar 1945

.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Macam-Macam Dampak Dalam Pertambangan Batubara.....	11
Tabel 2	: Kelemahan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .....	15
Tabel 3	: Argumentasi Pengembangan Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat .....	22
Tabel 4	: Hak Gugat Lingkungan Pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	23
Tabel 5	: Judul-Judul Penelitian yang Terkait dengan Disertasi Penulis. ....	32
Table 6	: Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah Terkait dengan Masyarakat Hukum Adat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	67
Tabel 7	: Prinsip-Prinsip Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan.....	69
Tabel 8	: Perbandingan Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Gugat masyarakat (Pasal 90 UUPPLH) .....	97
Tabel 9	: Perluasan Konsep Hak Gugat yang ada dala UUPPLH .....	98
Tabel 10	: Pengaturan Macam-Macam Hak Gugat Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Perkara Lingkungan Hidup.....	107
Tabel 11	: Pemohon Masyarakat Hukum Adat dalam Perkara Mahkamah Konstitusi.....	175
Tabel 12	: Peraturan Daerah Terkait Lembaga Adat.....	184
Tabel 13	: Kewajiban Negara Terhadap Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undang.....	186
Tabel 14	: Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Indigenous People dengan Lingkungan Hidup .....	192

Tabel 15 : Pengakuan Secara Nasional Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan pada Masyarakat Hukum Adat .....	197
Tabel 16 : Daftar Putusan Mahkamah Konstitusi yang Terkait Masyarakat Hukum Adat .....	198
Tabel 17 : Perbedaan Syarat/Ukuran Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat.....	239
Tabel 18 : Beberapa Kendala Masyarakat Hukum Untuk Mengajukan Hak Gugat.....	264
Tabel 19 : Subtansi Pengaturan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.....	273



## DAFTAR GAMBAR SKEMA

Gambar Peta 1	: Peta Pertambangan di Indonesia.....	2
Gambar Peta 2	: Peta Penyebaran Batubara dan Cadangan Sumber Daya Batubara di Indonesia Tahun 2011 .....	2
Gambar Peta 3	: Target Pemanfaatan Batubara Tahun 2013 .....	3
Gambar Peta 4	: Peruntukan Batubara .....	3
Gambar Peta 5	: IUP Batubara di Kabupaten Kutai Kertanegara. ....	6
Gambar Peta 6	: Peta Wilayah Kuasa Pertambangan Batubara Kota Samarinda .....	7
Gambar Peta 7	: Peta Sebaran Tambang Mineral dan Batubara dan Blok Migas di Indonesia .....	8
Gambar Skema 8	: Daya Rusak pertambangan Batubara Pada Masyarakat Hukum Adat .....	10
Gambar Skema 9	: Konsep Kewajiban Negara dan Hak Warga Negara Dalam Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat...	73
Gambar Skema 10	: Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat.....	96
Gambar Skema 11	: Hubungan Hukum Hak Gugat Pada Masyarakat Hukum Adat .....	125
Gambar Skema 12	: Pembagian Perikatan dalam Perbuatan Melanggar Hukum di Hukum Perdata.....	128